

MANFAAT TRANSPORTASI KAPAL FERI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KAWASAN PULAU TERLUAR, DAN EFEK PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH

Prasetya Ega Syaputra

Universitas Gadjah Mada-prasetya.syaputra@gmail.com

Mas Akbar Suhardianto

Institut Teknologi Nasional - akbar.suhardianto@gmail.com

Hilman Saputra

Politeknik Negeri Sriwijaya-hilmansaputra32@gmail.com

Submitted: 24 December 2023

Accepted: 2 January 2024

Published: 4 January 2024

Abstract

This research discusses the benefits of ferry transportation for economic growth in outer island areas and the impact of providing government subsidies. Outer islands often experience accessibility problems, which can limit economic growth and community welfare. Ferry transport was identified as an effective solution to overcome this challenge. The research uses literature study methods and economic data analysis with a focus on the outermost islands in the Riau Islands Province, Indonesia. The research results show that ferry transportation not only facilitates inter-island connectivity, but also becomes a catalyst for economic growth, especially in the tourism and trade sectors. Providing government subsidies for ferry services has a positive impact, maintaining operational sustainability and reducing the cost burden on local residents.

Keywords: Ferry transportation, Economic growth, Government subsidies

PENDAHULUAN

Kawasan pulau terluar memiliki potensi ekonomi yang besar namun seringkali menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal akses transportasi yang terbatas. Aksesibilitas yang terbatas menjadi kendala utama dalam mengembangkan potensi ekonomi kawasan pulau terluar, yang pada gilirannya dapat membatasi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Keterbatasan aksesibilitas di pulau terluar membatasi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan isolasi ekonomi. Beberapa pulau mungkin sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur transportasi yang ada, termasuk jalan darat yang tidak memadai atau bahkan tidak ada jalan sama sekali. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bagaimana transportasi kapal feri dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di kawasan pulau terluar perlu dikaji secara mendalam. Isu transportasi merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan analisis dari berbagai sudut pandang ilmu [1].

Transportasi adalah salah satu bidang yang dapat mendukung sektor ekonomi (sektor penggerak) dan sektor pelayanan (sektor pemberi layanan) dalam pertumbuhan ekonomi [2]. Hubungan antara kegiatan ekonomi dan transportasi sangat erat, dan keduanya memiliki kemampuan saling memengaruhi [3]. Moda transportasi laut menjadi esensial untuk memenuhi kebutuhan transportasi di wilayah kepulauan. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai strategi telah diimplementasikan untuk mengatasi tantangan ini, dan salah satu solusi yang muncul adalah penggunaan transportasi kapal feri. Kapal feri tidak hanya menjadi sarana transportasi yang efektif

dalam menghubungkan pulau-pulau terluar, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi kunci seperti pariwisata dan perdagangan.

Transportasi dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan barang dan manusia dari lokasi awal ke tujuan tertentu. Kegiatan ini melibatkan tiga elemen utama, yakni adanya muatan yang diangkut, ketersediaan kendaraan sebagai sarana pengangkutan, dan keberadaan infrastruktur jalan yang dapat dilalui [4]. Proses pemindahan ini melibatkan pergerakan dari tempat asal, tempat dimulainya kegiatan pengangkutan, hingga mencapai tempat tujuan, tempat kegiatan tersebut diakhiri. Melalui pemindahan barang dan manusia ini, transportasi menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi (sektor penunjang) serta sebagai penyedia layanan (sektor pelayanan) untuk perkembangan ekonomi [5]. Angkutan laut, di sisi lain, merujuk pada setiap kegiatan pengangkutan menggunakan kapal untuk membawa penumpang, barang, dan/atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, yang diorganisir oleh perusahaan angkutan laut (sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan merujuk pada kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang menggunakan kapal.

Kondisi geografis pulau terluar seringkali membuat akses darat yang sulit dan mahal. Oleh karena itu, kapal feri menjadi alternatif yang sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan barang dan orang antar-pulau, membuka jalur ekonomi baru, dan memperluas konektivitas kawasan tersebut dengan pulau-pulau di sekitarnya.

Transportasi kapal feri menjadi pilihan yang layak dan efektif untuk mengatasi tantangan aksesibilitas di pulau terluar. Kapal feri mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut dengan daratan utama dan pulau-pulau lainnya, membuka jalur perdagangan, pariwisata, dan investasi. Dengan meningkatkan konektivitas ini, peluang untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan perikanan menjadi lebih terbuka. Pentingnya transportasi kapal feri untuk kawasan pulau terluar tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan membuka aksesibilitas, masyarakat di pulau terluar dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang pekerjaan dengan lebih baik.

Namun, kendala keuangan sering kali menjadi hambatan dalam penyediaan layanan transportasi ini. Oleh karena itu, pemberian subsidi dari pemerintah menjadi faktor kunci yang dapat memastikan keberlanjutan dan ketersediaan layanan kapal feri. Subsidi tersebut tidak hanya dapat membantu menjaga kelangsungan operasional, tetapi juga membantu mengurangi beban biaya bagi penduduk lokal, membuat layanan tersebut lebih terjangkau dan dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat transportasi kapal feri dan efek dari pemberian subsidi pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan pulau terluar

serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan transportasi laut di daerah pulau terluar mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah (1) **Riset tentang Pola Pelaksanaan Transportasi Laut untuk Daerah Terpencil**, yang dilakukan pada tahun 2005 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi gambaran umum pola pelaksanaan transportasi laut yang dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah di subsektor perhubungan laut guna menghadapi permintaan pelayanan masyarakat terkait kelancaran mobilitas penduduk, distribusi barang, dan jasa di daerah terpencil. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi terkait pola pelaksanaan transportasi laut yang efektif dan efisien di daerah terpencil, dengan harapan daerah tersebut dapat berkembang untuk menghasilkan produksi dan jasa berkualitas. Metodologi penelitian ini melibatkan beberapa langkah, seperti pengumpulan data primer dan sekunder, observasi lapangan, analisis menggunakan pendekatan sektoral, regional, atau sektoral-regional, serta statistika deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian mencakup temuan bahwa masih banyak daerah terpencil yang belum menerima layanan angkutan laut, potensi sumber daya ekonomi di daerah terpencil tidak dapat didistribusikan secara efektif ke daerah yang sudah berkembang sebagai pasar daerah terpencil karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi laut. Selain itu, daerah terpencil yang sudah menerima layanan angkutan laut dengan waktu yang tidak pasti menghadapi keterbatasan ketika terjadi gejolak ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan faktor lainnya. Koordinasi antara pemerintah daerah, propinsi, pemerintah pusat, atau pihak terkait dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyelenggaraan transportasi laut juga belum optimal, terutama dalam hal pendanaan dan kerjasama. Masyarakat juga mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan luar daerah karena aksesibilitas layanan angkutan laut yang rendah. (2) **Kebutuhan Angkutan Laut yang Menghubungkan Pulau-pulau terpencil di Wilayah Kepulauan Riau**, yang dilakukan tahun 2014 oleh Teguh Himawan. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang konsep peningkatan layanan angkutan laut di pulau-pulau terpencil di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 19 pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, hanya 4 pulau yang dihuni oleh penduduk dan 1 pulau digunakan sebagai pangkalan militer. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Senoa di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, memiliki indeks konektivitas sebesar 0,05602221. Pulau Subi Kecil, berlokasi di wilayah Kecamatan Subi, memiliki indeks konektivitas yang sama, yaitu 0,05602221. Pulau Karimun Kecil, yang terletak di Kecamatan Tebing, memiliki indeks konektivitas sebesar 0,02433643. Sementara itu, Pulau Pelampung dan Pulau Nipah, yang berada di Kota Batam, memiliki indeks konektivitas masing-masing sebesar 0,0000448. Penelitian ini menghasilkan temuan Sistem transportasi laut di Provinsi Kepulauan Riau yang ada saat ini hanya menghubungkan Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kecamatan dengan Ibukota

Kabupaten/Kota dan Provinsi. Oleh karena itu, mengingat kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau, diperlukan pelayanan angkutan laut perintis yang mampu menghubungkan hingga tingkat antar desa, serta desa dengan Ibukota Kecamatan, dengan jadwal layanan yang teratur dan tarif yang terjangkau. Dalam konteks ini, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi serta Kabupaten/Kota sangat krusial dalam memberikan layanan angkutan laut perintis melalui Public Service Obligation, dengan mempertimbangkan kapasitas kapal yang kecil sesuai dengan perkiraan jumlah penumpang yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggabungkan pendekatan studi pustaka, dan analisis data ekonomi. Pendekatan ini dirancang untuk menyediakan pemahaman yang holistik tentang manfaat transportasi kapal feri bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan pulau terluar serta untuk mengevaluasi efek dari pemberian subsidi pemerintah terhadap efisiensi dan keberlanjutan layanan tersebut. Informasi yang diambil bersifat sekunder, yakni memiliki signifikansi tambahan yang berasal dari sumber-sumber di luar lokasi penelitian, seperti buku, data instansi, laporan, dan berbagai sumber lainnya. Sampel penelitian mencakup beberapa wilayah pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Data PDRB Provinsi Kepulauan Riau digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

PEMBAHASAN

A. Manfaat Transportasi Kapal Feri untuk Pertumbuhan Ekonomi pada Kawasan Pulau Terluar

Menurut Perpres Nomor 78 Tahun 2005, Pulau Kecil Terluar dapat diartikan sebagai pulau yang memiliki luas wilayah kurang dari atau setara dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) dan memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang mengikuti garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan nasional [6].

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 19 pulau yang berbatasan dengan negara tetangga yang tersebar di lima Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Penelitian yang dilakukan Teguh Himawan (2014), menyimpulkan hasil bahwa pulau terluar yang berada di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi keindahan dan perikanan [7], sehingga penggunaan kapal feri sangat dibutuhkan untuk mobilitas.

Tabel 1. PDRB Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022(Juta Rupiah)(BPS Provinsi Kepulauan Riau)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
----------------	------	------	------	------	------

Angkutan Laut	1.547.048,15	1.648.987,56	1.006.879,43	975.554,58	1.360.163,24
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Tabel 1. Perkembangan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022(%) (BPS Provinsi Kepulauan Riau)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Angkutan Laut	30,97	35,16	37,33	37,48	34,71	35,13

Data dari Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mencapai rata-rata 35,13 persen secara year-on-year (yoy) dari sektor transportasi laut. Seluruh sektor usaha di bidang transportasi laut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 37,48 persen. Secara bersamaan, berdasarkan harga konstan, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Riau pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, nilai PDRB Kepulauan Riau dari sektor Transportasi mencapai 1,360 triliun rupiah, menunjukkan peningkatan dari 975,55 miliar rupiah pada tahun 2021. Fakta ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebesar 34,71 persen selama tahun 2022, yang merupakan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pentingnya pelabuhan dalam konteks ini tidak hanya terkait dengan keuntungan moneter, melainkan lebih pada dampak positifnya terhadap ekonomi lokal di daerah pedalaman. Pelabuhan berperan sebagai infrastruktur ekonomi yang dapat memberikan dampak yang signifikan jika berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Transportasi kapal feri memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan aksesibilitas yang dihadapi oleh kawasan pulau terluar. Dalam konteks ini, manfaat dari penggunaan kapal feri sangat signifikan dan dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, yaitu:

1. Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas melalui transportasi kapal feri membawa dampak positif yang tidak hanya terbatas pada mobilitas fisik, tetapi juga merambah ke sejumlah aspek vital dalam pengembangan kawasan pulau terluar. Dalam kajian ini, akan diuraikan secara mendalam bagaimana peningkatan aksesibilitas melalui kapal feri berkontribusi secara signifikan terhadap transformasi ekonomi, sosial, dan infrastruktur di pulau-pulau terluar.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pulau-pulau terluar adalah keterbatasan aksesibilitas fisik. Sebelum adanya layanan kapal feri, pulau-pulau tersebut seringkali terisolasi dari daratan utama dan sulit dijangkau. Pelayanan transportasi yang terbatas membuat mobilitas penduduk lokal, barang, dan modal menjadi terhambat. Agar dapat mencapai wilayah terpencil hingga ke daerah pedalaman, satu-satunya sarana yang diperlukan adalah transportasi maritim

yang efisien oleh masyarakat [8]. Pada titik ini, kapal feri hadir sebagai solusi krusial, membuka jalan menuju kemajuan yang dapat diukur secara nyata.

Dengan diperkenalkannya layanan kapal feri, pintu akses yang terkunci sebelumnya terbuka, memungkinkan penduduk pulau terluar untuk lebih mudah bergerak dari dan menuju pulau tersebut. Dengan demikian, individu-individu di kawasan ini dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan dengan lebih efisien. Peningkatan aksesibilitas ini tidak hanya menciptakan konektivitas fisik, tetapi juga menciptakan jaringan sosial dan ekonomi yang lebih kokoh di antara pulau-pulau terluar.

Konektivitas antara dua atau lebih lokasi merupakan bagian integral dari sistem transportasi atau perangkutan, yang terwujud melalui pergerakan orang dan/atau barang dari atau menuju lokasi yang berbeda. Sesuatu yang menghubungkan lokasi awal dengan lokasi tujuan perjalanan dapat berupa jalur (untuk moda angkutan darat), rute (untuk moda angkutan udara), atau jalur rel (untuk moda angkutan kereta api). Sementara itu, aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang dapat dicapai atau dicapai dari lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, kapasitas dan konfigurasi infrastruktur transportasi menjadi elemen kunci dalam menentukan tingkat aksesibilitas [9].

Dalam konteks ekonomi, peningkatan aksesibilitas membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal. Sebelumnya, sektor usaha di pulau terluar mungkin terbatas oleh pasar yang sempit dan terisolasi. Dengan adanya kapal feri, pelaku usaha dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik di pulau terluar maupun di daratan utama. Ini dapat merangsang pertumbuhan sektor usaha lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, aksesibilitas yang ditingkatkan juga memberikan dorongan positif terhadap sektor pariwisata di pulau terluar. Keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan potensi atraksi wisata lainnya yang mungkin tersembunyi sebelumnya, kini dapat diakses dengan lebih mudah oleh wisatawan. Kapal feri menciptakan jalur wisata yang lebih terjangkau, mengundang kunjungan dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan pertumbuhan sektor pariwisata, pulau terluar dapat memperoleh pendapatan tambahan dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu.

Lebih dari sekadar aspek ekonomi, peningkatan aksesibilitas juga membawa dampak positif pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lokal dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan merasakan dampak positif dari pertukaran budaya yang lebih intensif dengan daratan utama. Dengan demikian, kapal feri tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga menjadi katalisator untuk perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pulau terluar.

Peningkatan aksesibilitas melalui transportasi kapal feri tidak hanya membuka pintu menuju mobilitas fisik yang lebih baik, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan pondasi yang lebih kuat untuk pembangunan berkelanjutan di pulau terluar. Oleh karena itu, peran kapal feri tidak hanya terbatas

pada fungsi transportasi semata, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif yang mendalam dalam dinamika sosial dan ekonomi kawasan pulau terluar.

2. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Perdagangan

Pulau-pulau terluar memegang potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan, dan transportasi kapal feri menjadi pendorong utama dalam mengaktifkan potensi tersebut. Dengan meningkatnya aksesibilitas melalui layanan kapal feri, pulau-pulau yang sebelumnya terisolasi dari daratan utama dan pusat-pusat ekonomi menjadi lebih mudah dijangkau. Hal ini membuka peluang baru dalam pengembangan sektor-sektor strategis, terutama sektor pariwisata dan perdagangan, yang pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kawasan pulau terluar.

a. Pariwisata

Banyak negara mengandalkan industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menyediakan jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan suatu wilayah sebagai tujuan wisata, dengan harapan dapat meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada wisatawan non-lokal [10]. Menurut Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata, pariwisata merujuk pada beragam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dengan kapal feri sebagai sarana transportasi yang efisien dan andal, pulau-pulau terluar dapat memanfaatkan keindahan alam dan kekayaan budaya mereka sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Destinasi yang sebelumnya sulit dijangkau kini menjadi lebih terbuka, memungkinkan para pelancong untuk mengeksplorasi keunikan dan kecantikan pulau-pulau tersebut. Peningkatan jumlah wisatawan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan sektor pariwisata, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru dalam bidang akomodasi, makanan dan minuman, serta aktivitas rekreasi.

Kapal feri juga membuka peluang untuk pengembangan ekowisata dan keberlanjutan lingkungan di pulau-pulau terluar. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, kawasan ini dapat memperkenalkan inisiatif keberlanjutan, melestarikan keanekaragaman alam dan budaya, sambil memberikan pengalaman wisata yang unik dan berharga bagi para pengunjung.

b. Perdagangan

Selain sektor pariwisata, peran kapal feri dalam membuka peluang perdagangan antar pulau terluar dan daratan utama sangat signifikan. Kapal feri tidak hanya membawa wisatawan,

tetapi juga menjadi sarana utama untuk mengangkut barang dan layanan antar lokasi tersebut. Ini menciptakan koridor perdagangan baru, membuka pintu bagi pertukaran komoditas lokal, produk pertanian, dan kerajinan tradisional. Pelayaran Nusantara mencerminkan tindakan migrasi penduduk ke wilayah yang lebih terpencil, termasuk dalam konteks pengangkutan komoditas dagang [11].

Dengan adanya layanan kapal feri, produsen lokal di pulau terluar memiliki akses lebih mudah ke pasar utama, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka. Sebaliknya, produk dari daratan utama juga dapat diakses dengan lebih efisien oleh penduduk pulau terluar. Peningkatan perdagangan ini menciptakan siklus ekonomi yang lebih dinamis, memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kemudahan transportasi kapal feri juga dapat merangsang investasi di sektor-sektor ekonomi lokal, termasuk industri kecil dan menengah. Fasilitas produksi, penyimpanan, dan distribusi menjadi lebih efisien dan terjangkau, menghasilkan efek positif pada sektor-sektor ini dan menciptakan lapangan kerja tambahan di kawasan pulau terluar.

c. Dampak Sosial dan Budaya

Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan melalui transportasi kapal feri tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial dan budaya positif. Interaksi antar komunitas meningkat, memungkinkan pertukaran budaya dan pengalaman yang dapat memperkaya identitas lokal. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan budaya mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian dan pengembangan kekayaan mereka.

Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan melalui transportasi kapal feri bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga tentang membangun keberlanjutan, memperkaya warisan budaya, dan menciptakan masyarakat yang lebih dinamis dan terhubung. Sebagai akibatnya, pemberdayaan pulau-pulau terluar melalui transportasi kapal feri bukan hanya strategi pembangunan ekonomi, tetapi juga langkah penting dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dan budaya.

B. Efek Pemberian Subsidi Pemerintah

Pemerintah tetap mengalokasikan subsidi untuk kapal-kapal perintis, kapal penumpang, kapal pelayaran rakyat (Pelra), dan kapal penyeberangan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari peran pemerintah dalam menyediakan sarana transportasi bagi masyarakat dan sebagai dukungan terhadap usaha masyarakat yang menggunakan kapal-kapal tradisional untuk mengangkut komoditas kebutuhan bahan pokok. Adolf R. Tambunan, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa keempat jenis layanan kapal laut ini terus menerima subsidi untuk menjaga agar biaya produksinya tetap

terkendali, sehingga tarif angkutnya tetap terjangkau bagi masyarakat dengan daya beli yang beragam.

Pemberian subsidi dari pemerintah pada sektor transportasi kapal feri di kawasan pulau terluar memiliki dampak positif yang signifikan. Subsidi tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penyedia layanan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

1. Meningkatkan Keberlanjutan Layanan

Pemberian subsidi dari pemerintah pada sektor transportasi kapal feri di kawasan pulau terluar memiliki dampak yang sangat signifikan terutama dalam menjaga keberlanjutan operasional layanan tersebut. Pulau-pulau terluar seringkali dihadapkan pada tantangan unik, termasuk terbatasnya jumlah penumpang dan keterbatasan dalam perkembangan ekonomi lokal. Inilah mengapa pemberian subsidi menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa layanan kapal feri dapat terus beroperasi, menjembatani kesenjangan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah tersebut.

Rute kapal feri yang menghubungkan pulau-pulau terluar seringkali kurang menguntungkan secara finansial. Dengan jumlah penumpang yang terbatas dan jarak yang cukup jauh, biaya operasional dapat menjadi kendala yang signifikan bagi operator kapal feri. Inilah dimana pemberian subsidi memiliki peran penting. Subsidi dapat berfungsi sebagai kompensasi untuk biaya operasional yang tinggi, menjaga agar rute-rute ini tetap beroperasi meskipun terdapat tantangan ekonomi yang signifikan.

Konektivitas antar-pulau merupakan elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan pulau terluar. Subsidi memastikan bahwa layanan kapal feri tetap berjalan pada rute-rute yang mungkin tidak memadai secara finansial tanpa dukungan pemerintah. Dengan tetapnya layanan ini, pulau-pulau terluar dapat tetap terhubung, memfasilitasi pertukaran barang, layanan, dan sumber daya manusia di antara pulau-pulau tersebut. Hal ini juga membuka peluang baru untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata dan perdagangan.

Pemberian subsidi pada layanan kapal feri tidak hanya berdampak pada keberlanjutan layanan itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan lokal. Operator kapal feri, seringkali merupakan bagian dari komunitas lokal, dapat memanfaatkan dukungan finansial ini untuk meningkatkan kualitas layanan, memberdayakan pekerja lokal, dan melibatkan masyarakat dalam operasional kapal feri. Ini menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Subsidi pemerintah juga dapat berperan sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi dalam operasional kapal feri. Operator dapat menggunakan dana subsidi untuk investasi dalam teknologi yang lebih efisien secara energi, perawatan dan pemeliharaan kapal yang lebih baik, atau pengembangan rute yang lebih efektif. Dengan demikian, subsidi tidak hanya menjaga keberlanjutan layanan saat ini tetapi juga memberikan dorongan untuk peningkatan berkelanjutan dalam industri kapal feri di pulau terluar.

2. Mengurangi Beban Biaya untuk Pengguna

Pemberian subsidi pemerintah pada sektor transportasi kapal feri tidak hanya berdampak pada kelangsungan operasional penyedia layanan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal dengan mengurangi beban biaya perjalanan. Dalam konteks kawasan pulau terluar, di mana keterbatasan akses menjadi hambatan utama, subsidi ini menjadi kunci dalam meningkatkan mobilitas penduduk dan mengurangi hambatan finansial yang dapat menghambat penggunaan layanan kapal feri.

Subsidi tersebut menciptakan insentif ekonomis bagi penduduk setempat untuk lebih sering menggunakan kapal feri sebagai sarana transportasi utama. Pengurangan biaya perjalanan menciptakan dampak positif langsung pada daya beli masyarakat, mengurangi beban finansial individu dan keluarga. Hal ini menghasilkan efek positif pada tingkat partisipasi dalam aktivitas ekonomi, termasuk pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan industri lokal.

Penting untuk diakui bahwa mengurangi beban biaya perjalanan juga menciptakan kesempatan baru bagi pelaku usaha lokal. Dengan masyarakat yang lebih mampu mengakses kapal feri, bisnis lokal, seperti hotel, restoran, dan toko souvenir, dapat mengalami peningkatan kunjungan dan penjualan. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat di sekitar pelabuhan-pelabuhan kapal feri, menggerakkan roda ekonomi lokal secara keseluruhan.

Pengurangan beban biaya perjalanan juga mendukung integrasi ekonomi antar-pulau. Masyarakat yang lebih mudah dan terjangkau dalam menggunakan kapal feri cenderung lebih aktif dalam menjalankan kegiatan ekonomi lintas pulau, memperkuat konektivitas antara pulau-pulau dan mempromosikan pertukaran budaya serta komersial.

Dengan demikian, mengurangi beban biaya perjalanan melalui subsidi pemerintah bukan hanya menjadi investasi dalam mobilitas fisik tetapi juga langkah strategis dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas di kawasan pulau terluar. Subsidi menjadi alat efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah tersebut.

3. Penyelarasan dengan Kebijakan Pemerintah

Pemberian subsidi pada transportasi kapal feri di kawasan pulau terluar memiliki signifikansi strategis dalam menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah pusat dan daerah terluar. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya mengembangkan semua wilayah negara, termasuk yang terpencil, sebagai bagian dari visi pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.

Subsidi pada transportasi kapal feri secara efektif mendukung tujuan pemerintah dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah. Dalam konteks ini, kapal feri tidak hanya dianggap sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan sosial antara pulau-pulau terluar dan pusat ekonomi nasional. Keberlanjutan layanan kapal feri melalui subsidi memastikan bahwa pulau-pulau terluar tetap

terhubung dengan pasar utama, memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi secara lebih efektif.

Pemberian subsidi tersebut sesuai dengan pandangan strategis pemerintah terkait inklusivitas ekonomi. Dengan menyediakan dukungan finansial untuk rute-rute kapal feri yang mungkin kurang menguntungkan secara komersial, pemerintah secara aktif berkontribusi pada menciptakan peluang ekonomi di kawasan yang sebelumnya terbatas oleh kendala aksesibilitas. Ini juga memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas dan beragam.

Penyelarasan dengan kebijakan pemerintah juga tercermin dalam upaya untuk meningkatkan konektivitas antar-pulau secara keseluruhan. Dengan mendukung layanan kapal feri, pemerintah menciptakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terluar. Transportasi yang handal dan terjangkau memperkuat ikatan ekonomi dan sosial antara pulau-pulau, menciptakan ekosistem yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Keberlanjutan layanan kapal feri melalui subsidi juga membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal pelestarian lingkungan. Dengan meningkatkan konektivitas melalui transportasi laut, pemerintah mendukung pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan di pulau-pulau terluar, meminimalkan tekanan terhadap ekosistem dan sumber daya alam yang terbatas.

Dengan demikian, pemberian subsidi pada transportasi kapal feri di kawasan pulau terluar dapat dianggap sebagai instrumen kebijakan yang berdaya guna dan sejalan dengan visi pemerintah dalam mencapai pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Dukungan finansial ini bukan hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga secara langsung membentuk fondasi untuk pertumbuhan ekonomi, inklusivitas, dan keberlanjutan di kawasan yang mungkin sebelumnya terpinggirkan. Oleh karena itu, kebijakan pemberian subsidi perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa manfaat ini dapat berkelanjutan dan merata di seluruh kawasan pulau terluar. *gan Kebijakan Pemerintah*

KESIMPULAN

Transportasi kapal feri memiliki peran krusial dalam mengatasi tantangan aksesibilitas di pulau terluar, membuka pintu menuju mobilitas fisik yang lebih baik, serta merangsang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas melalui kapal feri, dampak positifnya meluas ke sektor pariwisata dan perdagangan, memungkinkan pulau-pulau terluar memanfaatkan potensi keindahan alam dan kekayaan budaya sebagai daya tarik wisatawan. Pemberian subsidi pemerintah pada sektor ini berkontribusi signifikan dengan menjaga keberlanjutan operasional layanan kapal feri, membantu masyarakat lokal mengatasi kendala ekonomi, dan meningkatkan partisipasi dalam aktivitas ekonomi. Subsidi tersebut juga menjadi insentif untuk inovasi dan peningkatan efisiensi dalam industri kapal feri di pulau terluar. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis data ekonomi, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang manfaat transportasi kapal feri dan efek positif dari

subsidi pemerintah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan efisien di kawasan pulau terluar.

REFERENSI

- [1] Schipper, L. (2002). Sustainable urban transport in the 21st century: a new agenda. *Transportation research record*, 1792(1), 12-19.
- [2] Rifusua, A. I. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Busway Di DKI Jakarta Tahun 2004–2008. *Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia*, 1996, 10-38.
- [3] Tamin, O. Z. (2008). Perencanaan, pemodelan dan rekayasa transportasi. *Bandung: ITB*, 277.
- [4] Nasution, M. N., & Transportasi, M. (2008). Penerbit Ghalia Indonesia.
- [5] Rifusua, A. I. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Busway Di DKI Jakarta Tahun 2004–2008. *Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia*, 1996, 10-38.
- [6] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- [7] Himawan, T. (2014). Kebutuhan Angkutan Laut yang Menghubungkan Pulau-Pulau Terpencil di Wilayah Kepulauan Riau. *Warta Penelitian Perhubungan*, 26(6), 287-298.
- [8] Puriningsih, F. S. (2018). Meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan dukungan kapal pelayaran rakyat. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 20(2), 78-87.
- [9] Aminah, S. (2018). Transportasi publik dan aksesibilitas masyarakat perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil*, 9(1), 1142-1155.
- [10] Pujiastuti, R. R., & Samekto, P. A. (2019). Pemanfaatan transportasi laut untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 19(2), 151-164.
- [11] Yuliati, Y. (2016). Kejayaan Indonesia sebagai negara maritim (jalesveva jayamahe). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2)
- [12] Suryawan, R. F., & Fatchoelqorib, M. (2018). Penerbangan Perintis dalam Mengembangkan Perekonomian di Pulau Karimunjawa. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 5(2), 161-168.
- [13] Anggrahini, W. P. (2018). Upaya Peningkatan Konektivitas Angkutan Laut dan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota di Maluku. *Warta Penelitian Perhubungan*, 30(1), 23-34.
- [14] Sujai, M. (2011). Tinjauan Atas Kebijakan Subsidi Public Service Obligation (PSO) Pada PT. PELNI. *Warta Penelitian Perhubungan*, 23(4), 319-332.
- [15] Fitriani, R., & Imtiyaz, N. (2023). PENGARUH TRANSPORTASI LAUT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN. *SENSISTEK: Riset Sains dan Teknologi Kelautan*.